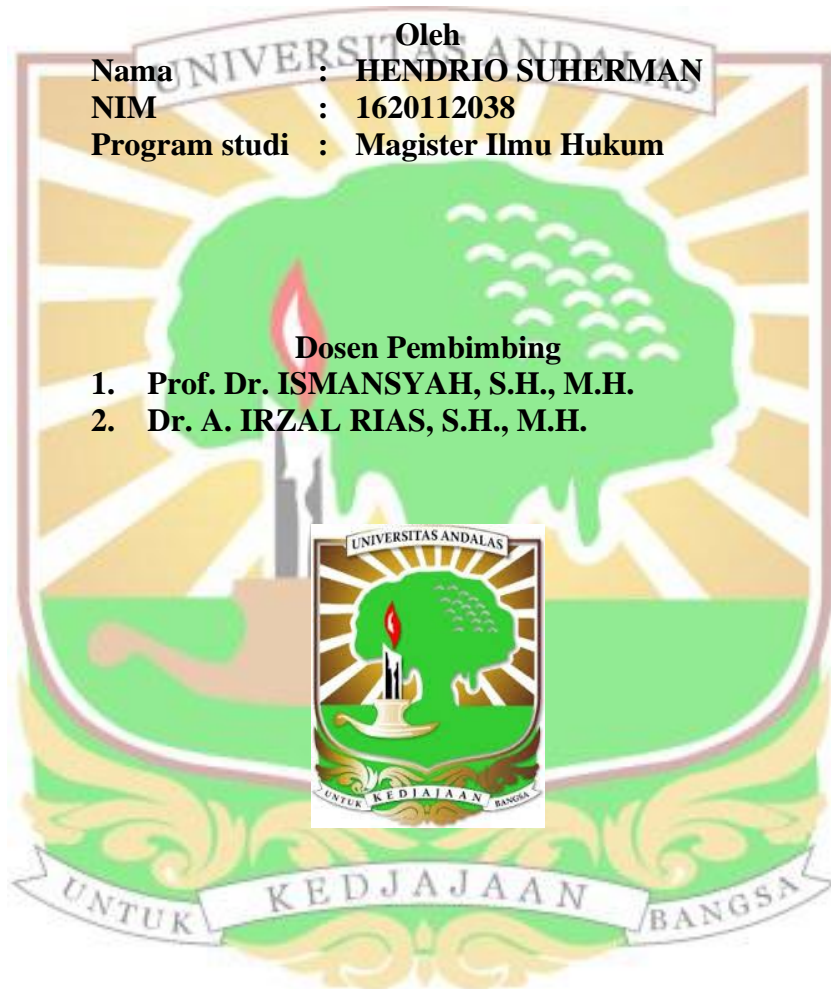


**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS
DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)**

Tesis

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

ABSTRAK

EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS
DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
(Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)

Dalam tesis ini membahas tentang eksekusi pidana denda minimum khusus dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Dharmasraya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yang tidak pernah terlaksana, karena jumlah pidana denda yang dijatuhkan terlalu tinggi sehingga terpidana tidak sanggup membayar. Terpidana lebih memilih pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Rumusan masalah yang dibahas yaitu problematika eksekusi sanksi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan upaya penyelesaian problematika eksekusi sanksi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris). Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah Teori Pidanaan dan Teori Penegakan Hukum. Teknik mengumpulkan dan mengolah data dari studi dokumen dan wawancara serta dianalisa dengan analisa kualitatif yaitu menggunakan persentase. Hasil penelitian ini adalah bahwa seluruh perkara tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 tidak satupun terpidana yang melaksanakan pidana denda. Para terpidana memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti denda karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh para terpidana serta pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktunya sangat singkat yang dianggap lebih menguntungkan, serta jangka waktu pelaksanaan eksekusi yang terlalu singkat sehingga penuntut umum tidak bisa melakukan upaya yang maksimal agar pidana denda dapat dilaksanakan. Upaya penyelesaiannya perlu pembenahan dalam tiga aspek, yaitu aspek penegak hukum dengan peningkatan profesionalisme jaksa, aspek peraturan perlu juga diadakan pembenahan supaya pidana denda dapat diterapkan sesuai dengan keadaan ekonomi, dan aspek masyarakat dengan meningkatkan Pengetahuan dan pendapat masyarakat terhadap pidana denda juga perlu ditingkatkan khususnya bahwa pidana denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang juga dapat memenuhi tujuan pidanaan pidana denda.

Kata Kunci : Eksekusi, Pidana Denda Minimum Khusus, Narkotika.

ABSTRACT

*EXECUTION OF SPECIAL MINIMUM AMERCEMENT SANCTIONS IN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009 ABOUT NARKOTIKA.
(Case In jurisdiction of the Dharmasraya State Prosecutor's Office Jurisdiction)*

This study discusses about In this thesis discusses the execution of criminal fines specifically in narcotics crimes in the Dharmasraya District Attorney from 2014 to 2017 which have never been carried out, because the amount of criminal fines imposed is too high so that the convicted person is unable to pay. The convicted person prefers to pay a fine as regulated in article 148 undang-undang nomor 35 tahun 2009 about narkotika concerning Narcotics to be replaced with a maximum imprisonment of 2 (two) years. problem of the execution of a special minimum amercement sanctions in undang-undang nomor 35 tahun 2009 about narkotika and to resolve the problem of the execution of a the execution of a special minimum amercement sanctions in undang-undang nomor 35 tahun 2009 about narkotika in the jurisdiction of the Dharmasraya State Prosecutor's Office. The research method used in this thesis is a sociological (empirical) juridical research method. Theories used to analyze these problems are Criminal Theory and Law Enforcement Theory. The technique of collecting and processing data from document studies and interviews and analyzed with qualitative analysis is to use percentages. The method used is the type of empirical research with the location Dharmasraya State Prosecutor's Office Jurisdiction. The results is all of narcotics criminal cases handled by the Dharmasraya State Prosecutor's Office Jurisdiction, none of the convicted persons carried out criminal fines decided by the judge. The convicts chose to carry out imprisonment in lieu of fines rather than pay criminal fines. This is due to two main factors namely the economic limitations of the convicted persons and the possibility of the perpetrators to replace the fines with substitute imprisonment which is very short term and is considered more profitable. Efforts to resolve it need improvement in three aspects, namely the law enforcement aspect by increasing the professionalism of prosecutors, regulatory aspects need to be improved so that criminal fines can be applied in accordance with economic conditions, and aspects of society by increasing Knowledge and public opinion of criminal fines also need to be improved in particular that criminal fines are also one of the main criminal sanctions that can also fulfill the purpose of criminal fines.

Keyword : Execution, Minimum amercement sanctions, Narcotics crimina